



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
 Volume 7 Nomor 4, 2024
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 29/10/2024
 Reviewed : 01/11/2024
 Accepted : 05/11/2024
 Published : 13/11/2024

Anisah Huzaifah¹
 Parlaungan Siahaan²
 Novridah Reanti
 Purba³
 Sopi Yanti⁴
 Sakinah Warohmah⁵
 Annisa Ridha Riyani⁶
 Chairani Fadilla⁷
 Alvina Oktavia⁸

ANALISIS PENGARUH MONEY POLITIK DALAM PELAKSANAAN PILKADA DI PROVINSI SUMATERA UTARA (STUDI KASUS: JL.M. YAKUB KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN)

Abstrak

Politik uang merupakan upaya menyuap pemilih dengan memberikan uang atau jasa preferensi suara pemilih dapat diberikan kepada seorang penyuap. Politik uang dilakukan untuk memperoleh suara yang banyak dan menguasai suara dalam Pilkada. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Jumlah informan dalam penelitian ini yaitu 10 informan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan politik uang dalam pilkada 2024 di Jl. M. Yakub, Sei Kera Hilir II. Kec. Medan Perjuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di lingkungan tersebut banyak melakukan money politik karena beberapa alasan salah satunya karena keterbatasan ekonomi masyarakat, rendahnya pendidikan, lemahnya pengawasan dan masyarakat menganggap bahwa money politik itu suatu kebudayaan atau kebiasaan. Sehingga hal tersebut memicu masyarakat untuk melakukan money politik.

Kata Kunci: Money Politik, Pilkada, Sosial

Abstract

Money politics is an attempt to bribe voters by giving money or voter preference services that can be given to a briber. Money politics is carried out to obtain many votes and control votes in the Pilkada. The research method used in this study is a qualitative approach. The number of informants in this study was 10 informants. The data collection techniques used in the study were by conducting observations, interviews, and documentation. The purpose of this study was to determine and describe money politics in the 2024 Pilkada on Jl. M. Yakub, Sei Kera Hilir II. Medan Perjuangan District. The results of the study showed that people in the area often did money politics for several reasons, one of which was due to the limited economy of the community, low education, weak supervision and the community considered money politics to be a culture or habit. So that this triggers people to do money politics.

Keywords: Money Politics, Regional Elections, Social

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (pemilu) yang di dalamnya termasuk pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), pemilihan legislatif (pileg) juga pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) merupakan perwujudan dari demokrasi prosedural. Oleh karena itu, negara demokrasi menyelenggarakan pemilu baik di tingkat nasional maupun daerah yang memilih pejabat baik legislatif maupun eksekutif. (Siregar & Maryanah, 2022).

Politik uang adalah tindakan memberikan uang atau barang kepada seseorang atau kelompok dengan tujuan mempengaruhi keputusan atau perilaku mereka (Tanjung & Ramadani, 2023).

^{1,2,3,4,5,6,7,8} Progam Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Medan
 email : huzaifahanisah@gmail.com

Kejadian yang paling umum dalam praktek politik uang adalah pemberian suara menjelang hari H pemilihan. Artinya, masing-masing calon mengadakan pendekatan kepada masyarakat. Pendekatan dilakukan baik secara langsung maupun dengan melalui perantara. Pada saat inilah transaksi dilakukan baik dengan pemberian uang kontan ataupun dengan suatu janji atau pemberian cheque (Ivanna & Sitepu, 2024).

Permasalahan klasik yang akan muncul ketika Pilkada dilaksanakan secara langsung salah satunya adalah penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk kepentingan pribadi kepala daerah menjelang pelaksanaannya. Hal tersebut ditandai banyak terjadinya kasus pengalokasian anggaran yang berujung penyimpangan anggaran dan korupsi yang dilakukan kepala daerah pada saat menjelang pelaksanaan pemilihan. Pemilihan umum kepala daerah di Indonesia menjadi salah satu penyebab terjadinya praktik korupsi, money politics, dan hubungan patronase yang kuat antara pemilih dan kandidat (Winoto & Falikhatun, 2015).

Menjelang pelaksanaan pemilihan umum baik di tingkat nasional dan pilkada di tingkat lokal banyak diwarnai dengan praktek-praktek jual beli suara (vote buying), penyalahgunaan wewenang dan penggunaan anggaran untuk kepentingan kampanye, serta berbagai pelanggaran lainnya. Modus yang dilakukan adalah dengan meningkatkan anggaran bantuan sosial menjelang pelaksanaan pemilihan untuk menarik simpati melalui pemberian bantuan sosial sekaligus kampanye secara terselubung (Rahmanto et al., 2021).

Politik uang atau jual beli suara pada dasarnya adalah membeli kedaulatan rakyat. Selain itu, rakyat yang menerima uang sebenarnya menggadaikan kedaulatannya untuk masa waktu tertentu. Jika kita menggadaikan kedaulatan kita kepada penguasa maka pada dasarnya kita tidak bisa mengklaim kedaulatan itu kembali. Setidaknya kita tidak punya hak untuk menuntut penguasa memberikan perhatian kepada kepentingan dan kebutuhan kita, karena kita sudah menerima imbalan atas legitimasi yang sudah kita berikan kepada mereka (penguasa). (Abdurrohman, 2021).

METODE

Penelitian dengan metode kualitatif menekankan pada proses berfikir yang induktif dengan mengamati sebuah fenomena yang senantiasa menggunakan logika ilmiah. Data kualitatif bersifat tidak terstruktur karena data tersebut bervariasi sesuai dengan sumbernya baik dari orang, partisipan dan respon yang di berikan oleh orang yang di tanyai.

Kondisi ini memang di buat sengaja oleh periset agar pandangan atau data yang di peroleh bisa lebih dalam dan lebih luas dari perspektif partisipan. Kebebasan partisipan dalam menyampaikan ide mampu memberikan pemahaman yang baik untuk permasalahan yang sedang di teliti bagi periset.

Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial yang terjadi dengan cara memaparkannya dalam bentuk rangkaian kata-kata yang pada akhirnya akan menghasilkan sebuah teori.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Money Politik Dalam Hasil Pilkada di Lingkungan JL. M Yakub, Sei Kera Hilir II, Kecamatan Medan Perjuangan

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa politik uang benar terjadi, di karenakan banyak Masyarakat yang mengaku pernah melihat dan menerima uang dari kandidat. Walaupun ada beberapa informan yang mengaku tidak menerima uang politik tersebut, namun tergolong sangat kecil. Secara pengertian, Masyarakat sudah mengetahui apa itu money politik walaupun Masyarakat hanya tau bahwa money politik itu adalah serangan fajar.

Masyarakat mengatakan jika tidak adanya money politik tersebut maka seperti adanya kekurangan dalam pilkada, sederhananya dapat dikatakan money politik telah menjadi kebiasaan saat menjelang pemilihan. Baik itu, dalam pemilu, pilkada dan pemilihan lainnya.

Dari hasil wawancara, ada beberapa pengaruh money politik dalam hasil pilkada:

1. Money politic dapat mengarah pada keterlibatan uang dalam proses pemilihan, yang dapat mengarah pada pilihan calon yang kurang sesuai dengan kepentingan masyarakat.
2. Money politic dapat mengarah pada keterlibatan korupsi dalam proses pemilihan.

3. Money politics dapat mengakibatkan masyarakat menerima informasi yang terbatas tentang calon legislatif.

Dampak Penggunaan Politik Uang Terhadap Masyarakat JL. M.Yakub, Sei Kera Hilir II, Kecamatan Medan Perjuangan

Money politik banyak memiliki dampak yang tidak bagus baik bagi pemerintahan dan masyarakat nya sendiri. Dari informan sendiri banyak yang mengatakan bahwa dampak dari money politik sendiri adalah terjadinya kecurangan dalam pemilihan sehingga suara yang di hasilkan tidak murni, maraknya korupsi dan hilangnya kepercayaan dari Masyarakat dan negara tidak akan berkembang.

Dampak jangka pendek dan jangka panjang money politik dalam pilkada, yaitu sebagai berikut:

1. Dampak jangka pendek dalam money politik dilingkungan jl m.yakub,sei kera hilir II kec.medan perjuangan ialah (1) Mengurangi Kepercayaan Masyarakat, (2) Polarisasi Sosial, (3) Kualitas Demokrasi Menurun.
2. Dampak jangka panjang yang didapatkan ialah (1) Pengaruh pada Kualitas Demokrasi, (2) Pembentukan Dinasti Politik (3) Korupsi dan Penyalahgunaan Dana Desa.

Dari hasil wawancara dan latar belakang informan dapat ditemukan kesesuaian faktor-faktor penerimaan politik uang :

1. Keterbatasan Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab utama adanya politik uang, kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari memaksa mereka menerima adanya politik uang.

2. Rendahnya Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat membuat masyarakat memahami politik uang dengan sempit. Hal ini menyebabkan masyarakat memiliki pemahaman yang rendah terhadap politik dan pelanggaran yang terjadi dalam pemilu.

3. Lemahnya Pengawasan

Lemahnya pengawasan terhadap politik uang bisa dilihat dari masih adanya praktik politik uang di tengah masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari pengakuan para informan yang masih menerima serangan fajar saat masa tenang

4. Kebudayaan

Sebagian masyarakat menganggap politik uang sebagai suatu hal yang sudah biasa karena sudah terjadi sejak lama, bahkan ada istilah yang cukup populer ditengah masyarakat, yakni politik uang (serangan fajar).

Peran Pemerintah Setempat di Lingkungan JL. M Yakub, Sei Kera Hilir II, Terkait Penerapan Money Politik

Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah setempat dalam menanggulangi money politik di lingkungan tersebut tidak ada. Alasan nya karena terkadang pemerintah setempat juga termasuk ikut dalam money politik sehingga sulit untuk memutus rantai money politik dan masyarakat sudah menganggap money politik itu menjadi kebiasaan sehingga sulit untuk menghilangkan money politik.

Untuk upaya masyarakat sendiri, masyarakat sudah boleh memviralkan apapun itu termasuk money politik dan itu termasuk upaya yang bagus dari masyarakat untuk mengatasi money politik. Beberapa masyarakat juga mengatakan upaya yang dapat dilakukan masyarakat untuk mengatasi politik uang yaitu dari individu atau dimulai dari diri sendiri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak dan sumber-sumber yang ikut serta dalam membantupengerjaan jurnal ini.

SIMPULAN

Masyarakat di lingkungan Jl. M. Yakub, Sei Kera Hilir II, Kecamatan Medan Perjuangan, sudah banyak melakukan praktik politik uang. Sebagian besar masyarakat menilai positif politik uang yang terjadi pada saat pilkada karena alasan kebutuhan ekonomi. Walaupun banyak masyarakat yang telah melakukan praktik politik uang, namun ada juga beberapa yang tidak melakukan praktik politik uang karena alasan politik uang tersebut haram. Di samping itu,

dampak yang ditimbulkan pun juga banyak, seperti kecurangan terhadap hasil suara, korupsi dan kepercayaan masyarakat pun menurun. Oleh sebab itu, perlu di lakukan upaya-upaya dari pemerintah untuk mengatasi money politik yang terjadi di lingkungan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrohman. (2021). Dampak Fenomena Politik Uang dalam Pemilu dan Pemilihan. *AWASIA: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi*, 1(2), 142–159.
- Febrianto, I. W., Widiati, I. A. P., & Suryani, L. P. (2020). Analisis Penanganan Politik Uang Ditinjau dari Undang-Undang Pilkada. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2), 110–115. <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2446.110-115>
- Hartaman, N., Purwaningsih, T., & Nurmandi, A. (2020). The Aristocrats Power on Local Politic in The Regency of Bone 2013-2018. *Journal of Governance*, 5(1). <https://doi.org/10.31506/jog.v5i1.7033>
- Mardiah, F., & Ilham Zitri. (2023). Pengaruh Praktik Politik Uang Terhadap Penyelenggaraan Pilkada Kota Mataram. *Jurnal Komunikasi Dan Kebudayaan*, 10(1), 78–92. <https://doi.org/10.59050/jkk.v10i1.222>
- Permata, C. Q. N., & Khasanah, N. B. U. (2020). *BUDAYA MONEY POLITICS DAN IDENTITY POLITICS DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA*.
- Rahmanto, F., Firmansyah, M. I., Purwaningsih, T., & Rafi, M. (2021). POLITIK ANGGARAN: ALOKASI DANA BANSOS PRA-PEMILIHAN PRESIDEN 2019 DI INDONESIA SEBAGAI ALAT MENINGKATKAN ELEKTABILITAS. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 6(1), 26. <https://doi.org/10.24198/jwp.v6i1.29422>
- Robi Cahyadi Kurniawan, D. H. (2019). Strategi Sosial Pencegahan Politik uang di indonesia. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 05(1), 29–41.
- Rumbekwan, Sohilait, M., Christian. (2022). IDENTIFIKASI PROBLEM PILKADA SERENTAK DAN KANALISASINYA. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 1(3), 19–28.
- Siahaan, P. G., Purba, N. R., Natasya, M., Naibaho, C. robert, & Manurung, N. olivia B. (2024). Pengaruh Tindakan Money Politic Terhadap Kualitas Calon Legislatif Dalam Membangun Demokrasi Yang Sehat Pada Pemilu Tahun 2024 Di Kelurahan Binjai, Medan Denai. *CIVICS: Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 9(1), 424–431. <https://doi.org/10.36805/civics.v9i1.7192>
- Siregar, M. C., & Maryanah, T. (2022). Fenomena Money Politics Dan Pembuktian Terstruktur Sistematis Masif (Tsm) Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung 2020. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 48(2), 141–158. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v48i2.1461>
- Sofia, A., Simanungkalit, D., Sitepu, E. M. R., Sihombing, F. T., Sinaga, D. F., & Lumbansiantar, R. (2023). *Realita Perilaku Pemilih Dalam Perspektif Mahasiswa Terkait Money Politik*. 1(1).
- Suyatno, S. (2016). Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Tantangan Demokrasi Lokal di Indonesia. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 1(2), 212. <https://doi.org/10.15294/jpi.v1i2.6586>
- Tanjung, W., & Ramadani, R. (2023). Analisis korelasi pendapatan masyarakat dengan politik uang dalam pemilu. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 8(1), 190. <https://doi.org/10.29210/30033202000>
- Winoto, A. H., & Falikhatun, F. (2015). Indikasi Penyalahgunaan Discretionary Fund Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Menjelang Pemilukada 2015. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 11(1), 75–91. <https://doi.org/10.21002/jaki.2015.05>
- Wou, A. (2018). PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP POLITIK UANG (MONEY POLITIC) DALAM SETIAP PESTA DEMOKRASI DI KAMPUNG SORYAR DISTRIK BIAK TIMUR KABUPATEN BIAK NUMFOR. *Gema Kampus IISIP YAPIS Biak*, 13(1), 8–14. <https://doi.org/10.52049/gemakampus.v13i1.58>